

EFEK MODERASI KOMPETENSI SDM TERHADAP PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN, AKSESIBILITAS, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PADA AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAPUAS

Verra Rizki Amelia^{1)*}, Ricky Yunisar Setiawan²⁾, Astri Dyastiarini³⁾, Rafles Ginting⁴⁾
^{1,2,3,4}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Palangkaraya
email : verreamelia@feb.upr.ac.id

ABSTRACT

Financial accountability reflects the government's ability to manage public resources transparently and responsibly. This involves the presentation of accurate financial reports, effective internal control systems, and accessibility of financial information to the public. This study aims to analyze the moderating effect of human resource (HR) competence on the influence of financial reporting presentation, accessibility, and internal control systems on the financial accountability of the local government of Palangkaraya City. This research is developed within a positivist paradigm using a quantitative approach and employs structural equation modeling (SEM) to analyze the data. A total of 120 data points were obtained through surveys distributed to government employees in Palangkaraya City working in the financial sector. The findings indicate that financial reporting presentation, accessibility, and internal control systems each have a positive and significant effect on financial accountability. HR competence, as a moderating variable, strengthens the influence of financial reporting presentation, accessibility, and internal control systems on financial accountability. Competent HR enhances financial accountability by effectively identifying financial transactions and presenting them in reliable, accurate, and easily understandable financial reports. Additionally, competent HR is capable of identifying and assessing potential risks in financial management.

Keywords: *Accessibility; Financial Accountability; Financial Reporting Presentation; Human Resource Competence; Internal Control System*

ABSTRAK

Akuntabilitas keuangan mencerminkan kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya publik secara transparan dan bertanggung jawab. Hal ini melibatkan penyajian laporan keuangan yang akurat, pengendalian internal yang efektif, serta aksesibilitas informasi keuangan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efek moderasi kompetensi sumber daya manusia (SDM) terhadap pengaruh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas, dan sistem pengendalian internal pada akuntabilitas keuangan pemerintah daerah Kota Palangkaraya. Penelitian ini dikembangkan dalam paradigma positivistik dengan pendekatan kuantitatif menggunakan *structural equation model* (SEM) untuk menganalisis data penelitian. Sebanyak 120 data diperoleh melalui *survei* yang disebarkan kepada pegawai pemerintah Kota Palangkaraya yang bekerja di bidang keuangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan, aksesibilitas dan pengendalian internal secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Kompetensi SDM sebagai variabel moderasi memperkuat pengaruh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas dan pengendalian internal terhadap akuntabilitas keuangan. SDM yang kompeten meningkatkan akuntabilitas keuangan karena mereka mampu mengidentifikasi transaksi keuangan dan menyajikannya dalam laporan keuangan yang mudah dipahami, andal dan akurat. SDM yang kompeten juga mampu mengidentifikasi dan menilai risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam pengelolaan keuangan.

Kata Kunci: *Aksesibilitas; Akuntabilitas keuangan; Kompetensi SDM; Penyajian laporan keuangan; Sistem Pengendalian Internal*

1. PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mereformasi sistem keuangannya, melalui desentralisasi fiskal yang merupakan spirit otonomi daerah. Mengutip Mardiasmo (2018), otonomi daerah bertujuan dalam proses peningkatan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan publik, upaya peningkatan partisipasi publik, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan demokratis di daerah. Sejalan dengan itu, pemerintah juga melakukan reformasi regulasi penyajian laporan keuangan untuk mendorong upaya perwujudan akuntabilitas keuangan di daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Peraturan Pemerintah, 2010) tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual menjadi acuan instansi pemerintah untuk menyediakan informasi komprehensif mengenai posisi keuangan, kinerja dan arus kas pemerintah. PP No.71/2010 tentang SAP berbasis akrual merupakan landasan teknis pengelolaan keuangan negara yang sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Peraturan Pemerintah, 2022) dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan.

Selanjutnya disampaikan oleh Mardiasmo (2018) bahwa akuntabilitas berarti bahwa pihak yang memegang amanah (pemerintah) memiliki tanggung jawab dalam pemberian sebuah bentuk pertanggungjawaban, menunjukkan, melaporkan dan mengungkapkan semua tindakan atau aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (masyarakat), yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Oleh karena itu, pemerintah harus selalu membuat laporan keuangan dengan hati-hati untuk menghindari pertanyaan yang dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap laporan keuangan mereka. Hadirnya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) memiliki keterkaitan dan peran penting dalam mendukung pengelolaan keuangan negara yang akuntabel. Kolaborasi kedua sistem teknologi tersebut sangat mendukung upaya instansi pemerintah dalam mewujudkan akuntabilitas

pengelolaan keuangan, dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam menilai dan mereview kinerja pemerintah.

Dalam pengukuran kinerja pemerintah, salah satunya tertuang dalam sebuah bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), merangkum kebijakan pemerintah dalam mengelolah keuangan daerah. LKPD tersebut perlu di selidiki oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk meningkatkan akuntabilitas pada laporan keuangan pemerintah daerah, hal ini sesuai dengan UU No.1/2022 yang berisi bahwa laporan pertanggungjawaban pemerintah atau laporan keuangan pemerintah yang telah disusun pada saatnya harus diaudit oleh BPK sebelum disampaikan kepada pihak legislatif sesuai dengan kewenangan yang ada. Setiap tahun LKPD menerima opini dari BPK yang terdiri dari empat opini yaitu; wajar tanpa pengecualian (WTP), wajar dengan pengecualian (WDP), tidak wajar (TW) dan tidak memberi pendapat (TMP).

Hasil pemeriksaan BPK-RI perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) memberikan opini WDP atas LKPD Kabupaten Kapuas tahun 2023.

Tabel 1. Perolehan Opini BPK Untuk Pemkab Kapuas Selama 4 Tahun Berturut

Tahun LKPD	Opini BPK
2020	WTP
2021	WTP
2022	WDP
2023	WDP

Sumber: BPK-RI Perwakilan Kalteng (2026)

Penurunan opini Pemkab Kapuas dipengaruhi oleh adanya realisasi belanja barang dan jasa, belanja modal, penyajian nilai investasi jangka panjang dan penyajian saldo aset tetap yang belum diimplementasikan secara optimal sesuai kebijakan akuntansi Pemkab Kapuas.

Pentingnya peran Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten sangat terlihat. SDM yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam akuntansi dan pengelolaan keuangan dapat menyusun laporan yang akurat dan transparan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah. SDM yang kompeten dapat menerapkan kebijakan

akuntansi dengan benar, termasuk penyajian nilai investasi jangka panjang dan saldo aset tetap, sehingga semua aset dan liabilitas tercatat dan tersaji dengan baik.

Hasil penelitian Somad, et al. (2023) menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan dan transparansi signifikan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sedangkan aksesibilitas tidak signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD. Hasil penelitian Latif & Mahmud (2022) dan Mulyanto et al. (2020) menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Sanda Sipi & Tandi (2021) menemukan pengaruh positif penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah Kota Makassar. Zeny et al. (2020) melakukan penelitian di Kota Bekasi, hasilnya menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan dan pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Sari et al. (2020) melakukan penelitian pada pemerintah daerah Kabupaten Klaten, hasilnya menunjukkan penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola laporan keuangan daerah namun SPIP memiliki dampak signifikan pada transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola laporan keuangan daerah. Kemudian Sabriani & Rahayu (2020) menemukan pengaruh positif penyajian laporan keuangan dan SPIP pada peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah Kota Tasikmalaya.

Erliyanti et al. (2022) menemukan pengaruh positif SPIP dan kompetensi SDM terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Kompetensi terkait dengan pengetahuan, keterampilan dan keahlian yang dimiliki seseorang. Pemerintahan daerah dituntut memiliki pejabat pengelola keuangan yang mampu menyusun laporan keuangan yang dapat dipercaya sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat ditingkatkan (Puspa & Prasetyo, 2020).

Dengan demikian, inkonsistensi hasil penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang memengaruhi akuntabilitas keuangan daerah menjadi celah krusial dalam studi ini. Di satu sisi, Sari et al. (2020) menemukan bahwa penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas di Kabupaten Klaten. Namun di sisi lain, Sabriani & Rahayu (2020) memberikan bukti kontradiktif di Kota Tasikmalaya yang menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan justru berpengaruh positif terhadap peningkatan akuntabilitas. Perbedaan temuan ini mengindikasikan adanya faktor kondisional yang belum terpetakan sepenuhnya dalam literatur sebelumnya.

Penelitian ini penting untuk menguji kompetensi sumber daya manusia (SDM) sebagai variabel moderasi. Sebagaimana ditegaskan oleh Erliyanti, Yuliani, & Hamdani (2022b) dan Puspa & Prasetyo (2020b), kompetensi yang mencakup pengetahuan dan keterampilan teknis merupakan prasyarat mutlak bagi pejabat pengelola keuangan untuk menghasilkan laporan yang kredibel. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah kompetensi SDM bertindak sebagai katalis yang memperkuat pengaruh penyajian laporan, aksesibilitas, dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas. Justifikasi ini bukan sekadar mereplikasi penelitian sebelumnya, melainkan berupaya memberikan solusi teoritis melalui pendekatan moderasi untuk menjelaskan mengapa instrumen akuntabilitas (seperti penyajian laporan dan aksesibilitas) seringkali memberikan hasil yang beragam di berbagai daerah.

Selain itu, penelitian ini juga memberikan penguatan implementasi teori *agency* dan teori *signalling* pada organisasi sektor publik, khususnya pemerintah daerah dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah dengan memerhatikan faktor penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, sistem pengendalian internal dan kompetensi SDM.

2. KAJIAN LITERATUR

Teori keagenan digunakan oleh peneliti untuk menjelaskan hubungan antara prinsipal dan

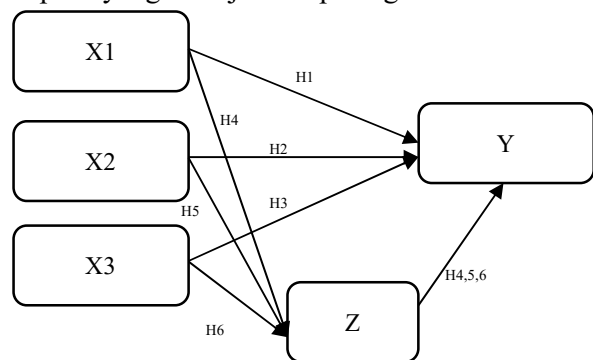
agen, dimana masyarakat sebagai prinsipal adalah pemegang saham dan pemerintah daerah sebagai agen adalah manajemen yang mengemban amanah untuk mengelola uang masyarakat dan kekayaan yang ada di daerah. *Agency theory* menganalisis susunan kontraktual diantara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi satu pihak (*principal*) membuat suatu kontrak, baik secara implisit maupun eksplisit dengan pihak lain (*agent*) dengan harapan agen akan bertindak atau melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh prinsipal (Jensen & Mekling, 1976; Bendickson et al., 2016).

Selain *agency theory*, penelitian ini juga menggunakan *signalling theory* sebagai *middle theory* yang menekankan penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas sebagai sinyal yang diberikan oleh pemerintah yang merepresentasikan akuntabilitas mereka dalam mengelola keuangan daerah. Teori sinyal merupakan pengembangan dari teori keagenan dimana teori ini berkaitan dengan hubungan antara manajemen dan penerima informasi yang menunjukkan adanya asimetri informasi antara pihak manajemen perusahaan dan berbagai pihak yang berkepentingan, berkaitan dengan informasi yang dikeluarkan tersebut (Ross, 1977). Kaitan teori sinyal dengan penelitian ini adalah dalam teori sinyal dijelaskan mengenai pentingnya pemberian informasi yang harus diberikan kepada pihak dalam dan pihak luar. Pihak dalam yaitu pemerintah itu sendiri, sedangkan pihak luar yaitu DPRD, Bawasda dan masyarakat.

Dalam konteks sektor publik, Teori Sinyal berfungsi sebagai kerangka logis untuk menjelaskan bagaimana pemerintah daerah (agen) berusaha mengurangi asimetri informasi dengan masyarakat dan lembaga pengawas (prinsipal). Teori sinyal yang berakar dari pemikiran Ross (1977b) menekankan bahwa pihak yang memiliki informasi lebih banyak (pemerintah) memiliki dorongan untuk menyampaikan informasi positif kepada pihak luar. Penyajian laporan keuangan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan sinyal kualitas (*signal of quality*). Ketika Pemerintah Kabupaten Kapuas menyajikan laporan keuangan secara tepat waktu, akurat, dan sesuai standar, mereka sedang mengirimkan sinyal

bahwa pengelolaan keuangan telah dilakukan secara bertanggung jawab, sehingga mengurangi kecurigaan atau asimetri informasi antara eksekutif dengan DPRD dan masyarakat. Secara substantif, sinyal bisa bersifat menyesatkan (*false signal*) jika tidak didukung oleh kapasitas organisasi yang memadai. Kompetensi SDM di sini berperan sebagai variabel yang memastikan bahwa sinyal yang dikirimkan (laporan keuangan) adalah benar dan berkualitas. Pejabat yang kompeten memastikan bahwa sinyal tersebut memiliki relevansi nilai. Tanpa kompetensi, penyajian laporan keuangan mungkin hanya menjadi formalitas tanpa substansi akuntabilitas yang nyata.

Model penelitian kemudian dibentuk berdasarkan penalaran teoritis kedua teori seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 1. Model Penelitian

Sumber : Data diolah (2026)

H1. Penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah.

Penyajian laporan keuangan yang berkualitas bertindak sebagai sinyal positif kepada masyarakat dan pemangku kepentingan bahwa pemerintah telah mengelola sumber daya publik sesuai standar. Laporan yang relevan, andal, dan dapat dibandingkan akan mengurangi asimetri informasi antara pemerintah dan publik. Sejalan dengan temuan Sabriani et al. (2020a) serta Somad et al. (2023), semakin baik kualitas penyajian laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah, maka semakin tinggi tingkat akuntabilitas yang dirasakan oleh

masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban amanah.

H2. Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah.

Transparansi informasi tidak hanya bergantung pada kualitas laporan, tetapi juga kemudahan publik dalam mengaksesnya. Sesuai dengan signalling theory, aksesibilitas yang baik memastikan sinyal akuntabilitas sampai ke pihak eksternal seperti DPRD dan masyarakat luas. Penelitian oleh A. Latif & Mahmud (2022) serta Sanda Sipi & Tandi (2021) menunjukkan bahwa ketersediaan informasi keuangan di media massa atau situs resmi memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ketika hambatan akses informasi diminimalisir, maka akuntabilitas pemerintah daerah akan meningkat secara signifikan.

H3. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah.

SPIP merupakan fondasi untuk menjamin bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai koridor hukum dan bebas dari kesalahan material. Sistem pengendalian yang efektif memberikan keyakinan memadai bahwa laporan keuangan yang dihasilkan adalah jujur dan transparan. Merujuk pada penelitian Silmi (2024), Sari et al. (2020) dan Erliyanti et al. (2022), implementasi pengendalian internal yang kuat mendorong terciptanya tata kelola yang bersih dan akuntabel, karena setiap potensi risiko penyimpangan dapat dideteksi dan dimitigasi sejak dini.

H4. Kompetensi SDM memperkuat pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah.

Penyajian laporan keuangan yang kompleks membutuhkan kapasitas intelektual aparatur agar informasi yang disampaikan benar-benar bernilai bagi pengguna. Kompetensi SDM berperan memperkuat kualitas sinyal yang dipancarkan melalui laporan keuangan. Sebagaimana ditegaskan oleh Puspa & Prasetyo (2020), pejabat pengelola keuangan yang

kompeten mampu menyusun laporan yang lebih kredibel, sehingga memperkuat dampak positif penyajian laporan terhadap peningkatan akuntabilitas keuangan daerah.

H5. Kompetensi SDM memperkuat pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah.

Keandalan akses informasi publik sangat bergantung pada kemampuan SDM dalam mengelola kanal distribusi informasi secara profesional. Pegawai yang memiliki keterampilan teknologi dan pemahaman regulasi akan memastikan data keuangan tersedia secara tepat waktu dan akurat bagi publik. Berdasarkan argumen dalam Somad et al. (2023), keberadaan SDM yang kompeten akan menjadikan aksesibilitas informasi lebih bermakna dalam mendorong akuntabilitas, dibandingkan jika akses diberikan tanpa dukungan petugas yang kapabel.

H6. Kompetensi SDM memperkuat pengaruh SPIP terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah.

Sistem pengendalian internal hanyalah sebuah prosedur mati jika tidak dijalankan oleh individu yang memiliki integritas dan kompetensi teknis yang mumpuni. Kompetensi SDM menjadi mesin penggerak yang memastikan setiap elemen dalam SPIP berfungsi secara optimal. Selaras dengan temuan Erliyanti et al. (2022), pengaruh SPIP terhadap akuntabilitas akan semakin kuat ketika didukung oleh aparatur yang memiliki pengetahuan dan kemampuan identifikasi risiko yang baik dalam setiap transaksi keuangan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis secara umum pengaruh antar variabel menggunakan analisis statistik. Variabel diukur menggunakan instrumen-instrumen penelitian agar data yang berupa angka bisa dianalisis atas dasar prosedur statistik (Bougie & Sekaran, 2019). Desain penelitian menggunakan *Single Cross Sectional* dimana sebuah sampel responden yang diperoleh dari populasi sasaran dengan

informasi yang diperoleh dari sampel itu hanya berlaku sekali saja (Bougie & Sekaran, 2019; Malhotra, 2010).

Penelitian ini menggunakan kuesioner yang mengukur Penyajian Laporan Keuangan (X1),

Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X3), Kompetensi SDM (Z), dan Akuntabilitas Keuangan Daerah (Y). Indikator dari tiap variabel dapat ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2. Indikator Pengukuran Variabel

No.	Variabel	Indikator	Sub-Indikator	Referensi
1	Penyajian Laporan Keuangan (X1)	1. Karakteristik Relevan	1.1 Memiliki manfaat umpan balik (feedback value) bagi pengguna.	PP No. 71 Tahun 2010 (Peraturan Pemerintah, 2010)
		2. Keterandalan	1.2 Memiliki manfaat prediktif untuk meramalkan masa depan.	
		3. Dapat Dibandingkan	1.3 Disajikan tepat waktu sehingga dapat memengaruhi pengambilan keputusan.	
		4. Dapat dipahami	1.4 Lengkap dalam menyajikan semua informasi yang material bagi pengguna.	
			1.5 Penyajian jujur antara informasi yang dilaporkan dengan peristiwa yang sebenarnya terjadi.	
			1.6 Dapat diverifikasi atau diuji kebenarannya oleh pihak yang berbeda dengan hasil yang sama.	
			1.7 Netralitas informasi, yaitu tidak diarahkan pada kepentingan pihak tertentu.	
			1.8 Konsistensi dalam penggunaan kebijakan akuntansi dari satu periode ke periode berikutnya.	
			1.9 Penggunaan istilah dan format penyajian yang disesuaikan dengan batas pemahaman pengguna laporan.	
2.	Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2)	1. Publikasi di Media Massa	2.1 Pemanfaatan media massa	A. Latif & Mahmud (2022; Sanda Sipi & Tandi, 2021b)
		2. Akses Situs Web Resmi	2.2 Ketersediaan dan kemudahan dalam mengakses informasi melalui situs web resmi pemerintah daerah (<i>e-government</i>).	
		3. Kemudahan Prosedur Permintaan Informasi	2.3 Keterbukaan instansi dalam melayani permintaan data keuangan dari masyarakat tanpa hambatan birokrasi yang rumit	
		4. Ruang Publikasi Fisik/Papan Pengumuman	2.4 Penyediaan sarana fisik di kantor-kantor pelayanan publik yang memungkinkan masyarakat melihat ringkasan realisasi anggaran secara langsung.	
3.	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X3)	1. Lingkungan Pengendalian	3.1 Penegakan Integritas	Sabriani & Rahayu (2020a; Sari et al., 2020b)
		2. Penilaian Resiko	3.2 Komitmen terhadap Kompetensi	
		3. Kegiatan Pengendalian	3.3 Kepemimpinan yang Kondusif	
		4. Informasi dan Komunikasi	3.4 Struktur Organisasi	
		5. Pemantauan	3.5 Identifikasi Risiko	
			3.6 Analisis Risiko	
			3.7 Respon Risiko	
			3.8 Penetapan Tujuan Penilaian Resiko	
			3.9 Review Kinerja	
			3.10 Pemisahan Fungsi	
			3.11 Otorisasi Transaksi	

No.	Variabel	Indikator	Sub-Indikator	Referensi
			3.12 Dokumentasi yang Baik	
			3.13 Pengendalian Fisik Aset	
			3.14 Kualitas Informasi	
			3.15 Saluran Komunikasi Efektif	
			3.16 Penyampaian Sinyal Transparansi	
			3.17 Pemantauan Berkelanjutan	
			3.18 Evaluasi Terpisah	
			3.19 Tindak Lanjut Temuan	
4.	Kompetensi SDM (Z)	1. Aspek Pengetahuan (<i>Knowledge</i>)	4.1 Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Erliyanti et al. (2022b; Puspa & Prasetyo, 2020b)
		2. Aspek Keterampilan (<i>Skill</i>)	4.2 Pengetahuan Regulasi Keuangan Daerah	
		3. 3. Aspek Kemampuan Identifikasi Transaksi dan Risiko	4.3 Pemahaman Kebijakan Akuntansi Entitas	
			4.4 Keterampilan Mengoperasikan Sistem Informasi	
			4.5 Keahlian Teknis Akuntansi	
			4.6 Kemampuan Penyajian Laporan	
			4.7 Identifikasi Transaksi Keuangan	
			4.8 Penilaian Risiko Pengelolaan Keuangan	
			4.9 Implementasi Kebijakan Aset dan Investasi	
			4.10 Pemecahan Masalah Administratif	
5.	Akuntabilitas Keuangan Daerah (Y)	1. Dimensi Kejujuran dan Hukum	5.1 Kepatuhan pada Regulasi	Mardiasmo (2021; Zeny Antika, Yunika Murdayanti, & Hafifah Nasution, 2020)
		2. Dimensi Manajerial dan Proses	5.2 Upaya memastikan tidak ada praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).	
		3. Dimensi Program dan Kebijakan	5.3 Kejujuran aparatur dalam menjalankan tugas pengelolaan sumber daya publik.	
		4. Dimensi Finansial dan Transparansi	5.4 Ketersediaan standar operasional prosedur yang menjamin ketepatan laporan.	
			5.5 Penggunaan sistem informasi (seperti SIPKD) untuk mendukung akurasi data.	
			5.6 Kecepatan dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada publik dan pihak legislatif.	
			5.7 Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Yang Mudah dipahami Masyarakat.	
			5.8 Pencapaian Target Kinerja	
			5.9 Pertanggungjawaban Kebijakan	
			5.10 Efisiensi Penggunaan Anggaran	
			5.11 Kebenaran Nilai Yang Dicatat pada Laporan Keuangan	
			5.12 Validitas Belanja Yang Sah	
			5.13 Upaya mempertahankan atau mencapai opini WTP	
			5.14 Keterbukaan Akses Informasi	
			5.15 Responsivitas Terhadap Keluhan	

Penelitian ini dilakukan di SKPD Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah selama 4 (empat) bulan. Data diperoleh melalui survei/angket yang disebarakan kepada pegawai pemerintah yang bekerja di bidang keuangan. Adapun

sampel pada penelitian ini ditentukan dengan menggunakan metode *non-probability sampling*. *Nonprobability sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap

anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yakni menggunakan teknik *pusposive sampling*. *Purposive sampling* adalah

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Bougie & Sekaran, 2019). Adapun kriteria tersebut dengan berdasarkan berikut:

Tabel 3. Kriteria Pemilihan Sampel

No.	Kriteria	Jumlah
1	ASN yang menjabat sebagai Kepala SKPD	41
2	ASN yang menjabat sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan	41
3	ASN yang menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran	41
Jumlah Sampel		123

Sumber: Pemerintah Kabupaten Kapuas (2026)

Teknik pengukuran di dalam penelitian ini menggunakan skala Likert, yaitu skala pengukuran melalui lima kategori respon dengan kisaran antara “sangat setuju” hingga ”sangat tidak setuju” di mana mensyaratkan seorang responden menetapkan derajat persetujuan atau tidak atas tiap-tiap rangkaian pernyataan tentang obyek stimulus (Malhotra, 2010). Menurut Sekaran (2019), *Skala Likert* di desain untuk mengkaji sejauh mana kekuatan subjek setuju atau tidak setuju atas pernyataan pada skala sembilan titik, yaitu: antara TS (Sangat Tidak Setuju) skor 1 dan SS (Sangat Setuju) skor 5.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Pemodelan persamaan *Structural Equation Modeling* (SEM) PLS. Menurut Hair et al. (2022), pemodelan persamaan struktural yang bertujuan untuk menguji hubungan sebab-akibat antarvariabel dalam suatu model meliputi hubungan item dengan indikator, indikator dengan konstruk, dan konstruk dengan konstruk lainnya. Model SEM merupakan teknik analisis multivariat teknik analisis elemen dengan analisis regresi. Penggunaan SEM PLS ini sesuai untuk yang menggabungkan menguji pemodelan bertingkat yang melibatkan banyak variabel (Goodboy & Kline, 2017). Kelebihan SEM PLS antara lain menyeluruh, mengukur model-model yang kompleks dan untuk pemodelan variabel laten (Goodboy & Kline, 2017). Model analisis jalur dalam penelitian ini adalah menggunakan persamaan struktural sebagai berikut (Widarjono, 2010: 231).

$$Y_2 = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon_1 \dots\dots\dots(1)$$

$$Y_2 = \beta_1 X_1.Z + \beta_2 X_2.Z + \beta_3 X_3.Z + \varepsilon_1 \dots\dots\dots(2)$$

Dimana:

- β = Koefisien regresi
- X_1 = Penyajian Laporan Keuangan
- X_2 = Aksesibilitas Laporan Keuangan
- X_3 = Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
- Z = Kompetensi SDM

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penyebaran kuesioner kepada pegawai pemerintah daerah Kabupaten Kapuas menunjukkan tingkat pengembalian 98%, dengan jumlah kuesioner yang kembali dan dapat diolah yang selanjutnya diuji dan dianalisis adalah sebesar 120 kuesioner.

Tabel 4. Tingkat Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Presentasi
Kuesioner yang disebar	123	100%
Jumlah kuesioner yang tidak Kembali	3	2%
Jumlah kuesioner yang tidak lengkap	0	-
Kuesioner yang memenuhi syarat	120	98%

Sumber: Data diolah (2026)

Selanjutnya dilakukan analisis statistik deskriptif yang menggambarkan keadaan responden yang perlu diperhatikan sebagai informasi tambahan untuk memahami hasil penelitian. Proporsi jumlah pegawai yang didominasi oleh laki-laki merepresentasikan ketidakseimbangan gender. Ketidakseimbangan

gender dalam posisi kepemimpinan dan pengambilan keputusan dapat membatasi perspektif dan suara yang dipertimbangkan dalam proses akuntabilitas. Norma-norma gender dalam budaya organisasi juga dapat menciptakan hambatan bagi perempuan untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses akuntabilitas. Responden berdasarkan usia menunjukkan bahwa sebagian besar responden berusia 31 – 40 tahun sebanyak 64 orang (54%), dimana seseorang dengan usia tersebut telah memiliki pengalaman dan pengetahuan yang cukup dengan bidang pekerjaannya.

Analisis deskriptif juga dilakukan terhadap variabel penelitian. Hal ini dilakukan agar dapat dengan mudah memahami data penelitian. Pengukuran variabel pada penelitian ini menggunakan skor 1 untuk terendah dan 5 untuk skor tertinggi, sehingga interval skor tersebut adalah 0,8. Analisis deskriptif juga dilakukan terhadap variabel penelitian. Hal ini dilakukan agar dapat dengan mudah memahami data penelitian. Pengukuran variabel pada penelitian ini menggunakan skor 1 untuk terendah dan 5 untuk skor tertinggi, sehingga interval skor tersebut adalah 0,8.

Tabel 5. Karakteristik Responden

Keterangan	Jumlah	Presentasi
Jenis Kelamin		
Laki-laki	76	63%
Perempuan	44	37%
Usia		
≤ 30 Tahun	15	12%
31 – 40 Tahun	64	54%
41 – 50 Tahun	24	20%
≥ 51 Tahun	17	14%
Pendidikan Terakhir		
SMA	10	8%
D3	13	11%
S1	83	69%
S2	14	12%
Total	120	100%

Sumber: diolah, penulis (2026)

Tabel 6. Statistik Deskriptif Variabel Penyajian Laporan Keuangan

Indikator	Mean	Median	Min	Max	Stdv	Kurtosis	Skewness
X1.1	4.876	5.000	4.000	5.000	0.329	3.341	-2.304
X1.2	4.526	5.000	4.000	5.000	0.499	-2.010	-0.104
X1.3	4.438	4.000	4.000	5.000	0.496	-1.957	0.251
X1.4	4.474	4.000	4.000	5.000	0.499	-2.010	0.104
X1.5	4.392	4.000	4.000	5.000	0.488	-1.819	0.447
X1.6	4.546	5.000	4.000	5.000	0.498	-1.985	-0.188
X1.7	4.423	4.000	4.000	5.000	0.494	-1.920	0.315
X1.8	4.603	5.000	4.000	5.000	0.489	-1.839	-0.425
X1.9	4.526	5.000	4.000	5.000	0.499	-2.010	-0.104
Rerata	4.534						

Sumber: Data diolah (2026)

Variabel penyajian laporan keuangan diukur dengan 9 (sembilan) indikator. Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif pada tabel 6, persepsi responden terhadap variabel Penyajian Laporan Keuangan adalah sangat baik dengan nilai rerata 4,534. Hal ini menunjukkan bahwa

responden memiliki persepsi yang sangat positif atau sangat puas terhadap penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh organisasi/instansi, yang telah dianggap telah relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Tabel 7. Statistik Deskriptif Variabel Aksesibilitas

Indikator	Mean	Median	Min	Max	Stdv	Kurtosis	Skewness
X2.1	4.490	4.000	4.000	5.000	0.500	-2.019	0.042
X2.2	4.732	5.000	4.000	5.000	0.443	-0.895	-1.056
X2.3	4.521	5.000	3.000	5.000	0.741	-0.155	-1.184
X2.4	4.778	5.000	3.000	5.000	0.439	1.872	-1.712
Rerata	4.630						

Sumber: Data diolah (2026)

Variabel aksesibilitas diukur dengan 4 (empat) indikator. Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif pada tabel 7, persepsi responden terhadap variabel aksesibilitas adalah sangat baik dengan nilai rerata 4,630. Hal ini mencerminkan bahwa secara umum, responden memberikan penilaian yang sangat positif

terhadap aksesibilitas. Persepsi responden yang sangat positif terhadap aksesibilitas mengindikasikan bahwa aksesibilitas telah diimplementasikan dengan baik dan memenuhi harapan pengguna. Ini dapat menjadi modal penting untuk mengembangkan atau meningkatkan akuntabilitas.

Tabel 8. Statistik Deskriptif Variabel SPIP

Indikator	Mean	Median	Min	Max	Stdv	Kurtosis	Skewness
X3.1	4.753	5.000	3.000	5.000	0.477	2.182	-1.739
X3.2	4.572	5.000	3.000	5.000	0.505	-1.540	-0.415
X3.3	4.546	5.000	4.000	5.000	0.498	-1.985	-0.188
X3.4	4.613	5.000	3.000	5.000	0.497	-1.337	-0.596
X3.5	4.572	5.000	3.000	5.000	0.505	-1.540	-0.415
X3.6	4.526	5.000	3.000	5.000	0.576	-0.418	-0.754
X3.7	4.454	4.500	3.000	5.000	0.584	-0.651	-0.523
X3.8	4.521	5.000	4.000	5.000	0.500	-2.014	-0.083
X3.9	4.510	5.000	3.000	5.000	0.530	-1.202	-0.356
X3.10	4.541	5.000	4.000	5.000	0.498	-1.993	-0.167
X3.11	4.608	5.000	4.000	5.000	0.488	-1.819	-0.447
X3.12	4.541	5.000	3.000	5.000	0.557	-0.552	-0.705
X3.13	4.572	5.000	3.000	5.000	0.505	-1.540	-0.415
X3.14	4.474	5.000	3.000	5.000	0.602	-0.479	-0.685
X3.15	4.608	5.000	4.000	5.000	0.488	-1.819	-0.447
X3.16	4.552	5.000	4.000	5.000	0.497	-1.977	-0.209
X3.17	4.572	5.000	3.000	5.000	0.505	-1.540	-0.415
X3.18	4.598	5.000	4.000	5.000	0.490	-1.857	-0.403
X3.19	4.515	5.000	4.000	5.000	0.500	-2.017	-0.062
X3.20	4.459	4.000	4.000	5.000	0.498	-1.993	0.167
Rerata	4.555						

Sumber: Data diolah (2026)

Variabel SPIP diukur dengan 20 (dua puluh) indikator. Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif pada tabel 8, persepsi responden terhadap variabel SPIP telah sangat baik dengan nilai rerata 4,555. Hal ini mencerminkan bahwa

responden memberikan penilaian yang sangat positif terhadap implementasi SPIP. Ini berarti bahwa responden menilai SPIP telah dijalankan dengan baik dan efektif.

Tabel 9. Statistik Deskriptif Variabel Kompetensi SDM

Indikator	Mean	Median	Min	Max	Stdv	Kurtosis	Skewness
Z.1	4.412	4.000	3.000	5.000	0.596	-0.653	-0.465
Z.2	4.500	4.500	4.000	5.000	0.500	-2.021	0.000
Z.3	4.814	5.000	4.000	5.000	0.389	0.665	-1.630
Z.4	4.639	5.000	4.000	5.000	0.480	-1.676	-0.584
Z.5	4.737	5.000	4.000	5.000	0.440	-0.830	-1.086
Z.6	4.737	5.000	4.000	5.000	0.440	-0.830	-1.086
Z.7	4.577	5.000	4.000	5.000	0.494	-1.920	-0.315
Z.8	4.701	5.000	4.000	5.000	0.458	-1.229	-0.885
Z.9	4.598	5.000	4.000	5.000	0.490	-1.857	-0.403
Z.10	4.820	5.000	4.000	5.000	0.385	0.815	-1.675
Rerata	4.654						

Sumber: Data diolah (2026)

Variabel kompetensi SDM diukur dengan 10 (sepuluh) indikator. Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif pada tabel 9, persepsi responden terhadap variabel kompetensi SDM telah sangat baik dengan nilai rerata 4,654. Hal ini mencerminkan bahwa adanya kepercayaan

yang tinggi dari responden terhadap kemampuan dan kapabilitas SDM dalam organisasi. Responden merasa yakin bahwa SDM memiliki kompetensi yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik.

Tabel 10. Statistik Deskriptif Variabel Akuntabilitas Keuangan Daerah

Indikator	Mean	Median	Min	Max	Stdv	Kurtosis	Skewness
Y.1	4.881	5.000	4.000	5.000	0.323	3.695	-2.378
Y.2	4.840	5.000	4.000	5.000	0.366	1.518	-1.871
Y.3	4.871	5.000	4.000	5.000	0.335	3.016	-2.233
Y.4	4.876	5.000	4.000	5.000	0.329	3.341	-2.304
Y.5	4.835	5.000	4.000	5.000	0.371	1.325	-1.820
Y.6	4.366	4.000	4.000	5.000	0.482	-1.703	0.561
Y.7	4.464	4.000	4.000	5.000	0.499	-1.999	0.146
Y.8	4.412	4.000	4.000	5.000	0.492	-1.891	0.359
Y.9	4.928	5.000	4.000	5.000	0.259	9.201	-3.333
Y.10	4.454	4.000	4.000	5.000	0.498	-1.985	0.188
Y.11	4.433	4.000	4.000	5.000	0.495	-1.946	0.273
Y.12	4.392	4.000	4.000	5.000	0.488	-1.819	0.447
Y.13	4.392	4.000	4.000	5.000	0.488	-1.819	0.447
Y.14	4.912	5.000	4.000	5.000	0.283	6.710	-2.940
Y.15	4.412	4.000	4.000	5.000	0.492	-1.891	0.359
Rerata	4.631						

Sumber: Data diolah (2026)

Selanjutnya dilakukan analisis SEM untuk mengidentifikasi hubungan antar variabel. Langkah pertama yang dilakukan yaitu evaluasi model pengukuran (*outer model*) untuk melihat hubungan antara variabel laten dengan indikator-indikatornya atau bisa dikatakan

bahwa *outer model* mendefinisikan bagaimana setiap indikator berhubungan dengan variabel latennya. Hasil uji validitas (*convergent validity*) menunjukkan bahwa terdapat beberapa konstruk variabel yang memenuhi syarat *loading factor* ($>0,5$).

Tabel 11. Hasil Uji Validitas

Variabel	Indikator	Loading Factor	Ket.
X1	X1.1	0.374	Tidak valid
X3	X3.1	0.374	Tidak valid
Y	Y.1	0.287	Tidak valid
	Y.2	0.418	Tidak valid
	Y.3	0.338	Tidak valid
	Y.4	0.357	Tidak valid
	Y.5	0.431	Tidak valid
	Y.9	0.218	Tidak valid
	Y.14	0.246	Tidak valid

Sumber: Data diolah (2026)

Indikator yang memiliki nilai *loading factor* < 0,5 dianggap tidak memiliki validitas yang cukup, sehingga harus dihilangkan atau dikeluarkan dari model penelitian. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan validitas konstruk, yaitu seberapa baik seperangkat indikator dapat mengukur konsep yang ingin diukur serta memperkuat model penelitian.

Menilai *convergent validity* juga dapat dilakukan dengan cara melihat nilai *average variance extracted* (AVE). Nilai AVE yang disyaratkan bahwa model dikatakan baik jika nilai AVE masing-masing konstruk > 0,5 (Abdullah, 2015).

Tabel 12. Average Variance Extracted (AVE)

Variabel	AVE sebelum modifikasi	AVE setelah modifikasi	Ket.
X1	0.500	0.542	Valid
X2	0.547	0.547	Valid
X3	0.515	0.557	Valid
Z	0.542	0.542	Valid
Y	0.598	0.640	Valid

Sumber: Data diolah (2026)

Pada tabel 10, dapat dilihat bahwa nilai AVE dari seluruh variabel lebih besar dari 0,5. Hal ini berarti bahwa semua variabel telah memenuhi syarat validitas dan dinyatakan sebagai model yang baik. Disimpulkan bahwa setiap indikator yang ada pada penelitian ini dapat dinyatakan valid dan data pada penelitian ini dapat diolah lebih lanjut karena memenuhi syarat *convergent validity*. *Outer model*, selain diukur dengan menilai validitas konvergen dan validitas diskriminan, juga dapat dilakukan dengan melihat reliabilitas konstruk atau variabel laten yang diukur dengan melihat nilai *composite reliability* dan *cronbach alpha* dari blok indikator yang mengukur konstruk. Adapun hasil untuk nilai *composite reliability* dan *cronbach alpha* dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 11 menunjukkan nilai *composite*

reliability untuk semua konstruk > 0,7 dan nilai *cronbach alpha* > 0,5. Nilai di atas 0,70 dianggap memiliki konsistensi internal yang baik, sehingga disimpulkan bahwa semua konstruk memiliki reliabilitas yang dapat diterima sesuai dengan batas nilai minimum yang disyaratkan.

Ghozali & Latan, 2015)Selanjutnya dilakukan evaluasi model struktural (*inner model*) yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antar variabel laten dalam model. Evaluasi inner model yang dilakukan yaitu dengan melihat nilai koefisien jalur, *R-square/Adjusted R-square*. *R-Square* digunakan untuk mengukur kekuatan prediksi dari model struktural. *R-Square* menjelaskan pengaruh variabel laten eksogen tertentu terhadap variabel laten endogen. Nilai *R-Square* 0,67; 0,33; dan 0;19

menunjukkan model yang kuat, moderat dan lemah (Chin *et al.* 1998 dalam Ghozali & Latan, 2015). Adapun hasil estimasi *R-square* dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 13. Composite Reliability

Variabel	Composite reliability	Cronbach alpha
----------	-----------------------	----------------

Penyajian laporan keuangan (X1)	0.759	0.686
Aksesibilitas (X2)	0.952	0.884
SPIP (X3)	0.905	0.897
Kompetensi SDM (Z)	0.913	0.886
Akuntabilitas (Y)	0.968	0.962

Sumber: Data diolah (2026)

Tabel 14. R-Square (R²)

Variabel	R-square	R-square adjusted
Akuntabilitas Keuangan Daerah	0.892	0.888

Sumber: Data diolah (2026)

Tabel 12 menunjukkan bahwa nilai *R-Square* untuk variabel endogen (dependen) adalah 0,892, sehingga menunjukkan model yang kuat. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabilitas konstruk Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas, SPIP dan Kompetensi SDM adalah sebesar 89,2% sedangkan 10,8% sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian.

Pengambilan keputusan atas uji hipotesis dilakukan dengan memperhatikan nilai signifikansi antar konstruk, t-statistik dan p-values. Melalui cara tersebut, maka nilai estimasi pengukuran dan standar *error* tidak lagi dihitung dengan asumsi statistik, tetapi didasarkan pada observasi empiris. Hipotesis dikatakan diterima jika dalam metode *resampling bootstrap* nilai *t-values* > 1,96 dan/atau nilai *p-values* < 0,05, maka H_a diterima dan H₀ ditolak.

Tabel 15. Hasil Uji Hipotesis

Item	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values	Keputusan
X1 → Y	0.239	0.235	0.055	4.341	0.000	H₁ diterima
X2 → Y	0.224	0.227	0.063	3.580	0.000	H₂ diterima
X3 → Y	0.137	0.140	0.051	2.533	0.043	H₃ diterima
X1 x Z → Y	0.212	0.205	0.063	3.368	0.001	H₄ diterima
X2 x Z → Y	0.130	0.136	0.064	2.043	0.041	H₅ diterima
X3 x Z → Y	0.158	0.160	0.057	2.793	0.005	H₆ diterima

Sumber: Data diolah (2026)

Pembahasan

Penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah.

Konstruk Penyajian Laporan Keuangan (X₁) memiliki nilai t-statistik sebesar 4,341 > 1,96 dan nilai p-value sebesar 0,000 < 0,05, sehingga H_a diterima dan H₀ ditolak. Oleh karena itu, hipotesis pertama diterima. Penyajian laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Pengaruh penyajian laporan keuangan adalah

sebesar *original sample* (O) yaitu 0,239. Artinya, semakin baik penyajian laporan keuangan, maka akuntabilitas keuangan daerah semakin baik. Hasil penelitian membenarkan kerangka teori agency di mana pemerintah sebagai agen bertanggung jawab kepada masyarakat sebagai *principal*. Penyajian laporan keuangan merupakan media pertanggungjawaban pemerintah untuk memberikan informasi yang relevan dan andal mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Hasil penelitian ini mendukung temuan

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Latif & Mahmud (2022) dan Sanda Sipi & Tandi (2021) yang juga menemukan pengaruh positif dan signifikan penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan. Hasil penelitian ini bertentangan dengan temuan penelitian Somad *et al.* (2023) dan Mulyanto *et al.* (2020) yang menemukan penyajian laporan keuangan tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah.

Konstruk Aksesibilitas (X_2) memiliki nilai t-statistik sebesar $3,580 > 1,96$ dan nilai p-value sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga H_a diterima dan H_0 ditolak. Oleh karena itu, hipotesis kedua diterima. Aksesibilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Pengaruh aksesibilitas adalah sebesar *original sample* (O), yaitu 0,224. Artinya, semakin baik aksesibilitas, maka akuntabilitas keuangan daerah semakin baik. Temuan ini membenarkan implementasi teori *agency* pada organisasi sektor publik. Masyarakat (*principal*) sebagai pihak yang memberikan kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah. Temuan penelitian ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Latif & Mahmud (2022) dan Sanda Sipi & Tandi (2021) yang menemukan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan. Temuan ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mulyanto *et al.* (2020) dan Somad *et al.* (2023).

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah.

Konstruk SPIP (X_3) memiliki nilai t-statistik sebesar $2,533 > 1,96$ dan nilai p-values sebesar $0,043 < 0,05$, sehingga H_a diterima dan H_0 ditolak. Oleh karena itu, hipotesis ketiga diterima. Sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif dan signifikan

terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Pengaruh SPIP adalah sebesar *original sample*(O) yaitu 0,137. Artinya, semakin baik SPIP, maka akuntabilitas keuangan daerah semakin baik.

Pengendalian internal yang efektif dapat membantu mengurangi asimetri informasi ini dengan memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan oleh *agent* lebih akurat dan transparan. Temuan penelitian ini mendukung penelitian Sari *et al.* (2020) dan Sabriani & Rahayu (2020) menemukan pengaruh positif dan signifikan pengendalian internal pemerintah terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. Pengendalian internal adalah salah satu cara untuk mengukur, mengarahkan, serta mengawasi atas kegiatan pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai, sehingga semakin baik pengendalian internal yang dilakukan oleh pemerintah maka pencapaian tujuan pemerintah yang efektif dan efisien akan tercapai.

Kompetensi SDM memperkuat pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah.

Interaksi Penyajian Laporan Keuangan (X_1) dan Kompetensi SDM (Z) sebagai variabel moderasi memiliki nilai t-statistik sebesar $3,368 > 1,96$ dan nilai p-values sebesar $0,001 < 0,05$, sehingga H_a diterima dan H_0 ditolak. Oleh karena itu, hipotesis keempat diterima. Penyajian laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah dimoderasi kompetensi SDM. Pengaruh moderasi kompetensi SDM pada hubungan penyajian laporan keuangan dan akuntabilitas keuangan daerah adalah sebesar *original sample* (O) yaitu 0,212. Artinya, semakin baik kompetensi SDM maka pengaruh penyajian laporan keuangan semakin besar terhadap peningkatan akuntabilitas keuangan daerah.

SDM yang memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai akan mampu menyusun laporan keuangan yang lebih akurat dan dapat diandalkan, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah. Temuan ini mendukung

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Erliyanti et al. (2022) yang menemukan bahwa kompetensi SDM mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Ketika laporan keuangan disusun dengan baik, hal ini tidak hanya mencerminkan kinerja keuangan yang baik, tetapi juga menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk transparansi dan akuntabilitas. Ini sejalan dengan temuan Erliyanti et al. (2022) yang menekankan pentingnya kompetensi SDM dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Kompetensi SDM memperkuat pengaruh penyajian aksesibilitas laporan keuangan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah.

Interaksi Aksesibilitas (X_3) dan Kompetensi SDM (Z) sebagai variabel moderasi memiliki nilai t-statistik sebesar $2,043 > 1,96$ dan nilai p-values sebesar $0,041 < 0,05$, sehingga H_a diterima dan H_0 ditolak. Oleh karena itu, hipotesis kelima diterima. Aksesibilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah dimoderasi kompetensi SDM. Pengaruh moderasi kompetensi SDM pada hubungan aksesibilitas dan akuntabilitas keuangan daerah adalah sebesar *original sample* (O) yaitu 0,130. Artinya, semakin baik kompetensi SDM maka pengaruh aksesibilitas semakin besar terhadap peningkatan akuntabilitas keuangan daerah.

Temuan ini mendukung implementasi teori *agency* dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, dimana hubungan antara pemerintah (sebagai *principal*) dan pegawai bidang keuangan (sebagai *agent*) menciptakan dinamika yang penting dalam akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan. Temuan ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Puspa & Prasetyo (2020) yang menemukan peran penting kompetensi SDM dalam meningkatkan aksesibilitas informasi keuangan guna mencapai akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Kompetensi SDM memperkuat SPIP terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah.

Interaksi SPIP (X_3) dan Kompetensi SDM (Z) sebagai variabel moderasi memiliki nilai t-

statistik sebesar $2,793 > 1,96$ dan nilai *p-values* sebesar $0,0015 < 0,05$, sehingga H_a diterima dan H_0 ditolak. Oleh karena itu, hipotesis keenam diterima. SPIP berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah dimoderasi kompetensi SDM. Pengaruh moderasi kompetensi SDM pada hubungan SPIP dan akuntabilitas keuangan daerah adalah sebesar *original sample* (O) yaitu 0,158. Artinya, semakin baik kompetensi SDM maka pengaruh SPIP semakin besar terhadap peningkatan akuntabilitas keuangan daerah.

Teori *agency* menekankan pentingnya transparansi dan pengawasan dalam hubungan antara *principal* dan *agent*. Dalam pengelolaan keuangan daerah, penerapan mekanisme pengendalian internal dan audit yang efektif dapat membantu meminimalkan risiko penyimpangan dan memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip akuntabilitas yang diharapkan dalam pengelolaan keuangan publik. Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Erliyanti et al. (2022) yang menekankan pentingnya peran SDM dalam implemmentasi pengendalian internal yang efektif.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis data penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal. Penyajian laporan keuangan mampu meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah. Semakin baik penyajian laporan keuangan, maka akuntabilitas keuangan daerah semakin baik. Hal ini disebabkan karena penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan SAP akan menghasilkan informasi berkualitas yang memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan.

Aksesibilitas laporan keuangan mampu meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah. Semakin baik aksesibilitas, maka akuntabilitas keuangan daerah semakin baik. Hal ini disebabkan karena aksesibilitas laporan keuangan merupakan upaya meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik atas

pengelolaan keuangan melalui informasi yang terbuka di media massa, mudah diakses dan ketersediaan informasi.

SPIP mampu meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah. Semakin baik implementasi SPIP, maka akuntabilitas keuangan daerah semakin baik. Hal ini disebabkan karena SPIP membantu pemerintah mengidentifikasi dan menilai risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam pengelolaan keuangan untuk memberikan keyakinan yang memadai sehingga memungkinkan pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel.

Kompetensi SDM memperkuat pengaruh penyajian keuangan terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Semakin baik kompetensi SDM, maka kemampuan penyajian laporan keuangan semakin besar dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah. Hal ini disebabkan karena SDM yang berkompeten mampu menyajikan laporan keuangan yang akurat dan dapat diandalkan sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap akuntabilitas keuangan daerah.

Kompetensi SDM dikatakan dapat memperkuat pengaruh aksesibilitas terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Semakin baik kompetensi SDM, maka kemampuan aksesibilitas semakin besar dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah. Hal ini disebabkan karena SDM yang berkompeten dapat memengaruhi seberapa besar aksesibilitas informasi dapat berkontribusi dalam meningkatkan akuntabilitas, mereka dapat menginterpretasikan data keuangan dan menyajikannya dalam format yang memudahkan pemangku kepentingan untuk menganalisis dan memahami informasi tersebut.

Kompetensi SDM dikatakan bahwa dapat memperkuat pengaruh SPIP terhadap aspek dari akuntabilitas keuangan daerah. Semakin baik kompetensi SDM, semakin besar kemampuan SPIP dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah. Hal ini disebabkan karena SDM yang kompeten dapat memahami dan menjalankan prosedur

pengendalian internal, mengidentifikasi dan mengatasi potensi risiko yang dapat memengaruhi akuntabilitas keuangan daerah.

Temuan penelitian ini membenarkan implementasi teori *agency* dan teori *signalling* pada organisasi sektor publik, khususnya pemerintah daerah dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah dengan memerhatikan faktor penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, SPIP dan kompetensi SDM. Masyarakat sebagai *principal* yang memberikan kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk memperoleh pertanggungjawaban dan akses informasi atas tindakan dan aktivitas pemerintah yang menggunakan kekayaan daerah. Temuan penelitian ini memperluas khasanah pengetahuan tentang pentingnya penyajian laporan keuangan, aksesibilitas dan SPIP dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah. Selain itu, kompetensi SDM merupakan faktor kunci yang memastikan bahwa penyajian laporan keuangan, aksesibilitas dan SPIP berjalan dengan efektif sehingga berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini tidak terlepas dari ketidaksempurnaan yang terdapat selama proses penelitian, diantaranya yaitu pada variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, terdapat tujuh indikator variabel yang dihilangkan karena tidak valid dalam mengukur variabel yang dituju. Variasi dan diversitas dalam data yang dikumpulkan dapat hilang jika banyak indikator konstruk dihilangkan. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan indikator lain selain indikator yang berdasarkan pada Hasanah *et al.* (2020) atau menggunakan pendekatan yang berbeda untuk mengkaji akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

6. UCAPAN TERIMAKASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua ICMA Rafles Ginting selaku Mentor penulisan artikel jurnal ini atas masukan dan dukungannya dalam penyelesaian penelitian.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Bendickson, J., Muldoon, J., Liguori, E. W., & Davis, P. E. (2016). Agency theory: background and epistemology. *Journal of Management History*, 22(4), 437–449. <https://doi.org/10.1108/JMH-06-2016-0028>
- Peraturan Pemerintah. (2010). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. *Indonesia, Pemerintah Pusat*. Indonesia, Pemerintah Pusat.
- Erliyanti, E., Yuliani, R., & Hamdani, H. (2022). Pengaruh kompetensi aparatur pemerintah, partisipasi masyarakat, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan gaya kepemimpinan terhadap good governance pada pengelolaan keuangan SKPD Kabupaten Balangan. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(11), 5252–5265. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i11.1825>
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial Least Squares Konsep Teknik dan Aplikasi dengan Program Smart PLS 3.0*. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang.
- Goodboy, A. K., & Kline, R. B. (2017). Statistical and Practical Concerns With Published Communication Research Featuring Structural Equation Modeling. *Communication Research Reports*, 34(1), 68–77. <https://doi.org/10.1080/08824096.2016.1214121>
- Hair, J. F., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2011). PLS-SEM: Indeed a silver bullet. *Journal of Marketing Theory and Practice*, 19(2), 139–152. <https://doi.org/10.2753/MTP1069-6679190202>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). THEORY OF THE FIRM: MANAGERIAL BEHAVIOR, AGENCY COSTS AND OWNERSHIP STRUCTURE. In *Journal of Financial Economics* (Vol. 3). Q North-Holland Publishing Company.
- Latif, A., & Mahmud, A. (2022). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dengan Transparansi Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Pemerintah Desa di Kabupaten Pati). *Business and Accounting Education Journal*, (3). <https://doi.org/10.15294/baej.v3i2.62451>
- Malhotra, N. K. (2005). *Riset Pemasaran Pendekatan Terapan Edisi 4 Jilid II* (Edisi Baha). Jakarta: Indeks.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi.
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Akuntansi sektor publik-edisi terbaru*. (Penerbit Andi., Ed.).
- Mulyanto, Nita Andriyani Budiman, & Muhammad Nuril Fahmi. (2020). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah dan Desentralisasi Fiskal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sebagai Variabel. *Jurnal Bingkai Ekonomi*, 6(1), 1–17.
- Peraturan Pemerintah. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.
- Puspa, D. F., & Prasetyo, R. A. (2020a). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(2), 281–298. <https://doi.org/10.25105/mraai.v20i2.7894>
- Ross, S. A. (1977b). *The Determination of Financial Structure: The Incentive-Signalling Approach*. *The Bell Journal of Economics*, 8(1), 23. <https://doi.org/10.2307/3003485>
- Sabriani, A. A., & Rahayu, S. (2020). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *JAE: Jurnal Akuntansi & Ekonomi*, 5(2).
- Sanda Sipi, A. D., & Tandi, A. (2021). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan

- Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah. *Jurnal Sosial Teknologi*, 1(11), 502–509. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v1i11.246>
- Sari, R. P., Mulyani, C. S., & Budiarto, D. S. (2020a). Pentingnya Pengendalian Internal untuk Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.26486/jramb.v6i1.697>
- Sekaran, U. (2015). *Research Methods For Business. Metode Penelitian Untuk Bisnis* (Edisi Baha). Penerbit Salemba Empat.
- Silmi, S. (2024). Analisis Maturitas: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Peraturan Bpkp Nomor 5 Tahun 2021. *Journal Of Applied Managerial Accounting*, 8(1), 47–58. <https://doi.org/10.30871/jama.v8i1.7304>
- Somad, F. H., Naz'aina, N., Khaddafi, M., & Razif, R. (2023). Pengaruh Penyajian, Akseibilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe. *Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM)*, 2(2), 202. <https://doi.org/10.29103/jam.v2i2.11866>
- Zeny, A., Yunika, M., & Hafifah, N. (2020). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 15(2), 212–232. <https://doi.org/10.21009/wahana.15.027>